

ANALISIS PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA ORGANISASI PUBLIK (STUDI KASUS BANJIR DI SUMATRA)

Rahmadini Puja¹, Devi Novitasari², Ria Maharani³, Sumiati⁴, Nurmala Sari⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

rahmadinipujadumai@gmail.com¹,

devinovitsshaasari863@gmail.com²,

maharaniria463@gmail.com³,

Sumiati250402@gmail.com⁴,

nurmala.sari6761@grad.unri.ac.id⁵



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Sumatra dan memerlukan keterlibatan aktif organisasi publik dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian manajemen pada organisasi publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, yang bersumber dari buku teks akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi relevan lainnya. Data dianalisis melalui teknik deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesis temuan pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengendalian manajemen dalam penanggulangan banjir di Aceh Tamiang masih belum optimal. Kelemahan utama teridentifikasi pada perencanaan strategis, pengelolaan anggaran darurat, pelaksanaan penanganan di lapangan, serta evaluasi kinerja pasca bencana. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemetaan risiko pra-bencana, keterlambatan penyaluran anggaran, serta belum adanya sistem evaluasi kinerja yang terstruktur. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi dan adaptif guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di masa mendatang. **Kata kunci: Pengendalian Manajemen, Organisasi Publik, Bencana Banjir, Aceh Tamiang, Studi Literatur**

Abstract

Flooding is a hydrometeorological disaster that frequently occurs in the Sumatra region and requires the active involvement of public organizations in its management. This study aims to examine management control in public organizations in flood disaster management in Aceh Tamiang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method, drawing on academic textbooks, scientific journal articles, research reports, and other relevant publications. Data were analyzed through qualitative descriptive techniques by classifying, comparing, and synthesizing findings from the literature. The results indicate that management control in flood disaster management in Aceh Tamiang has not yet been optimal. The main weaknesses are identified in strategic planning, emergency budget management, field implementation, and post-disaster performance evaluation. Inhibiting factors include limited human resources, weak pre-disaster risk mapping, delays in budget disbursement, and the absence of a structured performance evaluation system. This study emphasizes the need to strengthen an integrated and adaptive management control system to improve the effectiveness of flood disaster management in the future.

Keywords: Management Control, Public Organizations, Flood Disaster, Aceh Tamiang, Literature Review

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi geografis, serta dampak perubahan iklim menjadikan banjir sebagai bencana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian signifikan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Wilayah Sumatera termasuk salah satu kawasan yang secara rutin mengalami bencana banjir dengan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup serius, sebagaimana peristiwa banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 dan mengganggu aktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Penanganan bencana banjir tidak hanya bergantung pada kecepatan respons, tetapi juga memerlukan sistem pengendalian manajemen yang efektif dalam organisasi publik. Pengendalian manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses penanggulangan

bencana, mulai dari tahap perencanaan pra-bencana, penganggaran, pelaksanaan penanganan darurat, hingga evaluasi pasca bencana, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Lemahnya pengendalian manajemen berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya, keterlambatan distribusi bantuan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat terdampak.

Penelitian oleh Taufani Ahmad, Roni Ekha Putera, dan Yoserizal tahun 2023 dengan judul “Manajemen Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Bandang oleh BPBD Kabupaten Pasaman”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori manajemen strategi Hunger dan Wheelen, yang mencakup pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian manajemen dalam penanggulangan banjir belum berjalan optimal, khususnya pada aspek implementasi program, pengelolaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Hal ini ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya realisasi anggaran, serta belum maksimalnya evaluasi kinerja organisasi (Ahmad et al., 2023).

Selanjutnya, penelitian oleh Nurul Fadillah, Budi Setiawati, dan Sitti Rahmawati Arfah (2022) yang berjudul “Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir di Kabupaten Luwu Utara” menyimpulkan bahwa manajemen penanggulangan pasca banjir oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara belum berjalan secara optimal. Pada tahap rehabilitasi, BPBD masih terbatas pada kegiatan pembersihan dan perbaikan rumah warga terdampak, sementara program rehabilitasi lain belum terealisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, pada tahap rekonstruksi, pembangunan infrastruktur dan hunian tetap masih berada pada tahap usulan, sehingga proses pemulihan pasca bencana berjalan lambat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen organisasi publik dalam penanggulangan banjir, khususnya pada fase pasca bencana, masih menghadapi kendala perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pemulihan wilayah terdampak (Fadillah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudeno Atmaja, Bismar Arianto, dan Eki Darmawan (2024) dengan judul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023” menyimpulkan bahwa strategi penanggulangan pasca bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Karimun telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan analisis menggunakan teori strategi Kooten, ditemukan bahwa strategi organisasi dan strategi kelembagaan relatif berjalan cukup baik melalui koordinasi antarinstansi, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penerapan sistem peringatan dini. Namun demikian, strategi program dan strategi sumber daya masih menghadapi kendala utama, terutama keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum terealisasinya beberapa program yang masih berada pada tahap perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen pada organisasi publik dalam penanggulangan banjir belum optimal, khususnya pada aspek perencanaan program, pengelolaan sumber daya, dan efektivitas implementasi kebijakan (Atmaja et al., 2024).

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa organisasi publik dalam penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Kondisi tersebut juga tercermin dalam penanganan banjir di Aceh Tamiang, di mana koordinasi antarinstansi, kesiapan anggaran darurat, serta mekanisme evaluasi pasca bencana belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai pengendalian manajemen pada organisasi publik menjadi penting untuk memahami permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian manajemen pada organisasi publik dalam penanggulangan bencana banjir di

Kabupaten Aceh Tamiang melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pengendalian manajemen penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif pengendalian manajemen pada organisasi publik dalam penanganan bencana banjir di Sumatera khususnya pada daerah Aceh Tamiang, berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Studi literatur menurut (Sarwono, 2006), merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber pustaka, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, guna memperoleh landasan teori serta kerangka konseptual yang mendukung permasalahan penelitian. Studi literatur juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengolahan data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku akademik, jurnal nasional, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian tema dengan pengendalian manajemen organisasi publik dan penanggulangan bencana banjir. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui proses pengelompokan, perbandingan, dan sintesis temuan-temuan utama dari berbagai sumber pustaka. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan pola, tantangan, serta praktik pengendalian manajemen dalam organisasi publik pada konteks penanganan banjir di Aceh Tamiang.

Hasil dan Pembahasan Pengendalian

Pengendalian adalah proses yang terus-menerus dilakukan untuk mengawasi, mengukur, serta mengevaluasi kegiatan atau hasil kerja agar sesuai dengan rencana, standar, atau tujuan yang sudah ditentukan. Jika terjadi penyimpangan, maka langkah koreksi dilakukan agar tujuan bisa tercapai secara efisien. Beberapa pendapat para ahli mengenai arti pengendalian adalah sebagai berikut:

Menurut Mulyadi pengendalian adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sementara itu, menurut Indra Bastian, pengendalian merupakan tahap yang menentukan keberhasilan dalam manajemen. Dessler dan Darma menyatakan bahwa pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh organisasi untuk menghadapi berbagai risiko.

Menurut Hasibuan pengendalian adalah proses penjaminan bahwa perusahaan dan anggota dalam perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah upaya pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh atasan sebagai cara untuk menghindari risiko dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai (Yusuf et al., 2023).

Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu “manage” yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, serta memimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen dijelaskan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, menurut Pangesthi. Beberapa ahli memiliki pendapat tentang pengertian manajemen, berikut penjelasannya:

George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang serta sumber daya. Henry Fayol mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Rukmin et al., 2019).

Pengendalian Manajemen Pada Organisasi Publik

Dalam organisasi publik, pengendalian manajemen merupakan mekanisme penting yang berfungsi untuk menjamin bahwa semua program dan kegiatan termasuk penanggulangan bencana berjalan sesuai dengan tujuan perencanaan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif semata, tetapi juga mencakup proses perencanaan strategis, pengalokasian sumber daya secara efektif, pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi, serta evaluasi kinerja lintas instansi untuk memperbaiki respons di masa mendatang.

Bencana banjir di Sumatra, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian manajemen sering kali berdampak pada rendahnya efektivitas penanggulangan bencana. Hambatan ini muncul karena koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta kurang efektifnya sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan. Akibatnya, distribusi bantuan dan respons penanganan di beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan dan kesulitan akses terutama di daerah-daerah yang terisolasi. Misalnya, pemerintah daerah baru dapat menjangkau bantuan ke sebagian wilayah karena akses jalan masih terendam dan tertimbun longsor, sehingga penanganan belum menyentuh semua kecamatan terdampak secara merata (AntaraNews, 2025).

Upaya penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pengendalian manajemen lintas organisasi publik yang melibatkan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Polri, serta instansi terkait lainnya memegang peranan strategis dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, pendataan wilayah terdampak yang akurat, dan penyaluran bantuan logistik secara tepat sasaran. Berbagai kendala seperti keterbatasan akses wilayah, meningkatnya kebutuhan masyarakat terdampak, serta tuntutan mobilisasi sumber daya yang cepat dan terorganisasi menegaskan pentingnya sistem pengendalian manajemen yang kuat dan terintegrasi pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Analisis Pengendalian Manajemen

Analisis pengendalian dalam kasus banjir di Sumatra khususnya pada daerah Aceh Tamiang menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dalam pemerintahan belum berjalan secara optimal. Secara prinsip, pengendalian merupakan tindakan korektif yang dilakukan setelah terdeteksi adanya penyimpangan terhadap rencana atau kebijakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 374, yang menegaskan bahwa pengendalian pembangunan daerah harus dilakukan melalui pengawasan berkala, evaluasi hasil, serta pemberian tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran.

Namun, dalam praktiknya pengendalian terhadap lingkungan di beberapa daerah di Sumatra dilakukan secara terlambat. Pemerintah daerah baru melakukan penanganan setelah bencana terjadi, bukan dengan langkah antisipatif sebelumnya. Misalnya, banjir besar yang melanda Aceh Tamiang dipicu oleh pendangkalan sungai dan kerusakan daerah resapan air, kondisi yang sebenarnya dapat dicegah melalui pengendalian tata ruang dan pelaksanaan program konservasi secara berkelanjutan. Selain itu, mekanisme pengendalian terhadap izin

tambang dan perkebunan masih bersifat reaktif dan tidak bersandar pada sistem yang terpadu (Safitri, 2025).

Dalam penanggulangan banjir di Aceh Tamiang, pengendalian manajemen dapat dianalisis melalui empat indikator utama menurut Anthony & Govindarajan (2005), yaitu perencanaan strategis (pemrograman), penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Analisis ini sesuai dengan banjir bandang terbaru pada akhir November 2025 yang melumpuhkan 90% wilayah Aceh Tamiang akibat curah hujan ekstrem. Menyebabkan ribuan rumah rusak, evakuasi massal, dan keterbatasan akses dasar seperti air bersih serta listrik (AntaraNews, 2025). Berikut penjelasan dari indikator-indikator tersebut.

1. Perencanaan Strategis (Pemrograman)

Perencanaan strategis pada pengelolaan bencana banjir mencakup proses identifikasi risiko melalui analisis data curah hujan, kondisi geologi tanah, serta tingkat kerentanan wilayah untuk menyusun program mitigasi yang komprehensif sebelum kejadian bencana terjadi. Dalam peristiwa banjir Aceh Tamiang pada November 2025, luapan sungai dan genangan air setinggi tiga meter di Kota Kuala Simpang mengindikasikan bahwa pemetaan risiko pra-bencana belum optimal, sehingga gagal mengantisipasi isolasi wilayah serta krisis air bersih yang memaksa masyarakat mengonsumsi air genangan berpotensi membahayakan kesehatan. Kelemahan ini tercermin dari kurangnya skenario darurat yang matang, di mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan BPBD setempat seharusnya telah mengintegrasikan rencana kontingensi berbasis data historis banjir berulang di wilayah Sumatera (Batubara, 2025).

2. Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dalam pengelolaan bencana menekankan prinsip alokasi dana yang cepat dan fleksibel, termasuk penyediaan cadangan logistik serta infrastruktur darurat untuk mendukung respons yang efektif. Di Aceh Tamiang, penerbitan status tanggap darurat selama 14 hari oleh Gubernur Aceh (28 November-11 Desember 2025) justru menyoroti hambatan dalam mobilisasi anggaran, yang terlihat dari keterlambatan distribusi bantuan esensial seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan ke posko pengungsian meskipun telah ada instruksi dari TAGANA. Selain itu, meskipun PLN mengerahkan personel dari berbagai provinsi untuk memulihkan pasokan listrik, kesenjangan antara kebutuhan lapangan yang mendesak dan kapasitas dana yang tersedia mengindikasikan kurangnya mekanisme alokasi darurat yang adaptif, khususnya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi berskala besar (BeritaPalu, 2025).

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan bencana banjir mencakup koordinasi operasional lintas lembaga untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran serta pemulihan fasilitas umum secara efisien. Di Aceh Tamiang, respons darurat sejak 26 November 2025 melibatkan TNI/Polri, Basarnas, dan relawan dalam kegiatan evakuasi massal, pembersihan sekolah serta fasilitas publik yang terendam, serta pengiriman logistik melalui helikopter ke wilayah terisolasi akibat longsor dan genangan banjir yang mencapai tiga meter. Namun, tantangan aksesibilitas masih signifikan, seperti keterbatasan fasilitas sanitasi yang memaksa pengungsi buang air besar di tanah terbuka, serta gangguan komunikasi yang menghambat koordinasi terpadu antar lembaga, sehingga memperpanjang waktu pemulihan di lapangan (BeritaPalu, 2025).

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja mengharuskan pengukuran efektivitas respons melalui indikator seperti waktu pemulihan dan umpan balik komunitas untuk perbaikan kebijakan masa depan. Hingga Desember 2025, belum tersedia laporan evaluasi terstruktur dari BPBD Aceh Tamiang mengenai efektivitas tanggap darurat banjir November 2025, meskipun upaya mitigasi pra-bencana seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemeliharaan infrastruktur drainase telah dilakukan sebelumnya. Kelemahan ini berpotensi mengulang kesalahan serupa, seperti kurangnya integrasi pelajaran dari banjir susulan di wilayah Sumatera lainnya, sehingga diperlukan sistem monitoring pasca bencana yang transparan, berbasis data, dan dipublikasikan secara publik untuk mendukung adaptasi kebijakan yang berkelanjutan (Yanuarwati, 2025).

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa faktor yang mendukung pengendalian manajemen dalam penanggulangan banjir di Aceh Tamiang. Keterlibatan berbagai aktor seperti BPBD, TNI/Polri, Basarnas, TAGANA, PLN, serta relawan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan penanganan darurat khususnya pada proses evakuasi dan distribusi bantuan. Penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah juga memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi mobilisasi sumber daya dan pengerahan personel lintas daerah. Selain itu, pengalaman organisasi publik dalam menangani bencana hidrometeorologi sebelumnya di wilayah Sumatera turut mendukung keberlangsungan respons darurat meskipun dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.

Namun demikian, pengendalian manajemen dalam penanggulangan banjir di Aceh Tamiang masih menghadapi berbagai hambatan. Perencanaan strategis pra-bencana yang belum optimal terlihat dari lemahnya pemetaan risiko dan kurangnya rencana kontingensi berbasis data historis banjir, sehingga organisasi publik tidak sepenuhnya siap menghadapi dampak banjir berskala besar. Dari sisi penganggaran, keterlambatan mobilisasi dana dan distribusi bantuan menunjukkan belum efektifnya mekanisme anggaran darurat yang fleksibel dan adaptif. Pada tahap pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas sanitasi, serta aksesibilitas wilayah yang terputus akibat banjir dan longsor menghambat koordinasi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, belum tersedianya evaluasi kinerja yang terstruktur dan transparan pasca bencana menyebabkan lemahnya proses pembelajaran organisasi, sehingga berpotensi mengulang permasalahan yang sama pada penanganan banjir di masa mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen pada organisasi publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum berjalan secara efektif. Kelemahan utama terdapat pada tahap perencanaan pra-bencana yang belum didukung oleh pemetaan risiko dan penyusunan rencana kontingensi yang berbasis data kejadian banjir sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan organisasi publik dalam menghadapi bencana banjir berskala besar.

Pada aspek penganggaran, mekanisme penyediaan dan pencairan dana darurat belum bersifat fleksibel dan responsif, sehingga berdampak pada keterlambatan mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Dalam tahap pelaksanaan, meskipun melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, TNI/Polri, Basarnas, dan relawan, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, akses wilayah yang sulit, serta minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, belum tersedianya sistem evaluasi kinerja yang terstruktur dan transparan menunjukkan lemahnya proses pembelajaran organisasi pasca bencana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian manajemen yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data dalam penanggulangan bencana

banjir. Perbaikan pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas organisasi publik dalam merespons dan meminimalkan dampak bencana banjir, baik di Kabupaten Aceh Tamiang maupun di daerah lain di Indonesia.

Referensi

- Ahmad, T., Putera, R. E., & Yoserizal. (2023). Manajemen Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 04(02), 34-49.
- AntaraNews. (2025). Bupati Aceh Tamiang: Banyak daerah bencana banjir masih terisolir. Retrieved from Antara News Aceh website: <https://aceh.antaranews.co/berita/396961/bupati-aceh-tamiang-banyak-daerah-bencana-banjir-masih-terisolir?>
- Atmaja, S., Arianto, B., & Darmawan, E. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 2(4), 34-45.
- Batubara, N. (2025). Pengungsi Aceh Tamiang kesulitan air bersih, buang air besar di tanah- 'Saya pakai genangan banjir'. Retrieved from BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c07525gj2j0o>
- BeritaPalu. (2025). Banjir Bandang Aceh Tamiang, 14 Kabupaten/Kota Ditetapkan Status Darurat. Retrieved from BeritaPalu,Id website: <https://beritapalu.id/2025/12/01/banjir-bandang-aceh-tamiang-14-kabupaten-kota-ditetapkan-status-darurat/>
- Fadillah, N., Setiawati, B., & Arfah, S. R. (2022). Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara. *Journal Unismuh*, 3(3), 722-732.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rukmin, H. J., Khalid, A., & Rizal, S. (2019). Peranan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 173-183.
- Safitri, E. (2025). Sisa Banjir Aceh Tamiang: Truk Bertumpuk-Rumah Bergeser ke Jalan. Retrieved from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-8255522/sisa-banjir-aceh-tamiang-truk-bertumpuk-rumah-bergeser-ke-jalan>
- Yanuarwati, W. (2025). Banjir Sumatera, Korupsi, dan Darurat Kemanusiaan. Retrieved from Mongabay website: <https://mongabay.co.id/2025/12/21/banjir-sumatera-korupsi-dan-darurat-kemanusiaan/>
- Yusuf, Haryoto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen*. Kabupaten Solok Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.